

DAFTAR PUSTAKA

- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. In *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*(Vol.4).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i6.1150>
- Fangohoi, U., & Sandy, S. (2020). Analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Kier Taksi Gelap Di Kabupaten Mimik. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 4(2), 1–15.
- Fitri, H. (2021). *Kontribusi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bengkalis).
- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Jasasila. (2017) Analisis Kontribusi Retribusi Pelayanan Kesehatan terhadap Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batanghari 2017. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* Vol 10(1).
- Martini, R., Pambudi, S. B., Mubarok, M. H., Akuntansi, J., & Sriwijaya, P. N. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2, 90–95. <https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>
- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4).
<http://ejournal-1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Putra, N. D. (2021). Strategi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. (*Doctoral Dissertation, IPDN Jatinangor*).
- Putra, S., Robert Tuerah, P., Mesra, R., Sukwika, T., Sarman, F., Alifin Nur, N., Nuruzzaman, M., Susmita, N., Nurmalia Sari, M., Ladjin, N., Mulyapradana, A., Keristiana Sinaga, E., & Saddam Akbar, J. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kuantitatif*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital.

- Rajab, A. (2020). KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAMUJU. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 114–156.
- Rifurariani, W., Elim, I., & Kalalo, M. Y. B. (2020). Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 92–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/iaj.27785>
- Siging, R., Sumampow, I., & Sampe, S. (2021). Manfaat Dermaga Serey Terhadap Transportasi Laut Di Kecamatan Likupang Barat. *Jurnal Eksekutif*, 1(2), 1–10.
- Wulandari, N., Sarita, B., Hamid, W., & Zaluddin. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Organisasi (JUMBO)*, 6(3), 653–663. <https://doi.org/10.33772/jumbo.v6i3.23192>
- Suandy, E. (2017). Perencanaan Pajak. (M. Masykur, Ed.) (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wa Ode, L., Masuli, D. K., Yeni, R., & Arifin, A. L. (2023). Analisis strategi pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Buton Utara tahun 2016-2020. *Widya Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 33-42.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah dan retribusi daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang- Undang Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah*.
- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana*.

- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang peraturan tentang jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan.*
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tiket angkutan penyeberangan secara elektronik.*
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintahan Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran.*
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan*
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.*
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah.*
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Staf Akuntan Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Bengkalis, diwawancarai di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pada (03 Oktober 2024).
- Staf Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Bengkalis, diwawancarai di Kantor Pelabuhan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Bengkalis pada (11 Desember 2024).